



DPRD Ingin Desentralisasi Pengelolaan Sampah Diawasi Ketat

DPRD Kota Jogja mendorong Pemkot Jogja menata dan mengawasi secara ketat desentralisasi pengelolaan sampah di Kota Jogja.

Usulan ini menyusul adanya wacana dari Pemkot Jogja yang akan memanfaatkan tenaga penggerobak atau transporter untuk mengangkut sampah secara komunal dari masing-masing lokasi warga, menuju ke depo. Dengan sistem pengangkutan semacam ini, masyarakat tak perlu repot untuk membuang sampah langsung ke depo-depo sampah.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Muhammad Afnan menyebut setelah DPRD Kota Jogja menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja beberapa waktu lalu, program desentralisasi pengelolaan

sampah ini menjadi solusi tepat bagi penanganan 245 ton sampah harian.

Namun, untuk memastikan program ini berjalan dengan baik diperlukan adanya pendataan semua rumah pelanggan sampah.

Ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan peta jalan persampahan. Setiap rumah tangga maupun tempat usaha wajib terdaftar di bank sampah terdekat untuk bisa diambil sampahnya secara komunal atau bersama-sama untuk dibuang ke depo.

"Di program ini, sampah yang diterima di depo adalah jenis sampah residu organik dan residu anorganik sehingga setiap rumah tangga, pengelola kegiatan, atau usaha wajib melakukan upaya pengurangan sampah

melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan penggunaan kembali sampah," ujarnya, Senin (27/1).

Affan mengatakan mulai Januari ini Kemantren Kraton dan Pakualaman dipilih menjadi lokasi percontohan. Lalu, nantinya akan dikembangkan pada lima kemantren pada Februari dan tujuh kemantren lainnya pada Maret.

Untuk itu, alur tata kelola pengambilan sampah harus ditata dan diawasi dengan baik. Sebab, Affan melihat adanya kemungkinan kebocoran.

"Ada rumah tangga yang tidak berlangganan sampah sehingga mereka berpeluang membuang sampah di berbagai tempat kosong. Atau, ada warga yang membuang sampah di tempat

sampah milik tetangganya. Persoalan inilah yang harus diawasi dan dievaluasi lebih jauh," katanya.

Affan menambahkan, Pemkot Jogja perlu menyiapkan kebijakan bagi warga yang tidak berlangganan sampah.

Diperlukan juga pencatatan terkait lokasi mereka membuang sampah. Tidak hanya itu, sebagai dukungan untuk mempercepat proses desentralisasi dan pemahaman akan pentingnya pemilahan sampah mandiri dari rumah DLH Kota Jogja juga diharapkan untuk memperluas pembuatan lubang biopori di kelurahan-kelurahan padat penduduk agar gerakan desentralisasi sampah bisa masif diikuti warga.

"Jika pengawasan ini tidak dilakukan ketat maka persoalan sampah di Kota Jogja tidak akan



Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan timbunan sampah di depo yang ada di wilayah Kota Jogja belum lama ini.

pernah tertangani dengan optimal. Hal ini tentunya akan sangat sia-sia mengingat setiap tahunnya anggaran penanganan persoalan sampah yang diambilkan dari

APBD mencapai puluhan miliar. Kami berharap program bisa maksimal dengan dana yang digelontorkan," ungkapnya. (AM Annisa Karim)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005